

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI KABUPATEN LANNY JAYA-PAPUA

Teraik Kogoya, Benu Olfie, dan Olly Esry Laoh

*Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah,
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : teraikkogoya@gmail.com*

RINGKASAN

Penyediaan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, partisipasi dalam kegiatan pembangunan berarti kesempatan untuk meningkatkan keikutsertaan keberdayaan dan bagi pemerintah partisipasi masyarakat berarti penghematan anggaran. Pelaksanaan program dana pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Lanny Jaya menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan besaran kontribusi masyarakat. Ini dapat dijadikan cerminan dari tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Lanny Jaya.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif. Data primer diambil dengan melakukan wawancara dan observasi di setiap kampung yang menja disampel. Sampel yang ditentukan secara *purposive* dari 245 desa / kelurahan sejumlah 9 desa pada 9 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Lanny Jaya data sekunder diambil dari instansi pemerinta yang ada di Kabupaten Lanny Jaya yaitu: Badan Pusat Statistik, BAPEDA, BPMK, Dinas PU, Kantor Distrik/Kecamatan, Kantor Kepala Kampung / Desa, dan buku-buku referensi. Data analisis secara kuantitatif.

Hasil penelitian digunakan tiga kategori untuk mengukur tingkat partisipasi yaitu: partisipasi masyarakat tingkat tinggi, partisipasi masyarakat tingkat sedang dan partisipasi masyarakat tingkat rendah, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dilihat dari keaktifan sampai dengan tidak aktif. Bahwa Karakteristik desa yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan geografi serta tingkat pendidikan masyarakat memiliki korelasi terhadap tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di seluruh desa memiliki bentuk yang seragam yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga, material, dan dana.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan. Adapun saran dalam penelitian ini yakni perlunya mempertahankan keaktifan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan serta perlunya peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang sudah dikerjakan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Jalan Desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan yang berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar perdesaan. Dua faktor ketertinggalan perekonomian pedesaan dibandingkan dengan kota yaitu : (1) Konteks struktural dan (2) konteks kultural. Konteks struktural menunjukkan pada kebijakan pembangunan (ekonomi & politik) yang lebih mengutamakan pembangunan perkotaan ketimbang perdesaan.

Ketimpangan pembangunan khususnya di perdesaan, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi di perdesaan, tidak terlepas dari implementasi kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dengan negara sebagai aktor utama. Kebijakan pembangunan yang bersifat *betting strong policy* dengan strategi *state cetered development*. Dalam konteks ini negara menjadi inisiator, pelaksana, sekaligus pengawas dari keseluruhan pembangunan. Melalui aparat birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah, hampir semua proses pembangunan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik ditentukan, diarahkan dan didorong oleh mereka. Model pembangunan yang *top down* ini tidak saja telah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada negara, lebih dari itu telah mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi pasif sekaligus obyek pembangunan. Dalam konteks ini pendekatan *development for the people* lebih mengedepan ketimbang *development of the people*.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, tanah pekarangan, material.

Kajian Pustaka

Data penduduk Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan tidak lagi berbeda jauh, yakni 113,7 juta jiwa perdesaan dan 106,2 juta jiwa di perkotaan (BPS, 2005). Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2004 mencapai 24,6 juta jiwa jauh lebih tinggi dari pada di perkotaan, yaitu 11,5 juta jiwa. Sementara itu, jangkauan pelayanan infrastruktur di perdesaan masih jauh dari memadai.

Para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lain. Pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut (Pangouw Diane. 2003) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase bangunan - bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Menurut Siagian, H. (1989) pembangunan desa yang dilakukan dengan pendekatan multisektoral, partisipatif, berlandaskan kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas. Berdasarkan hal tersebut ada (3) tiga prinsip pokok pembangunan desa.

Kebijaksanaan dan langkah - langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan yaitu:

- a. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Stabilitas yang cukup tinggi dan dinamis.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menjediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan – bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi – fungsi sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Pada dasarnya penyediaan infrastruktur dilaksanakan oleh masing – masing individu, sama halnya dengan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan dasar lainnya seperti sadang dan pangan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain.

1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin
2. Pembangunan menjadi lebih murah karena masyarakat juga menanggung sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut

3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat.

Lin Herlina (2003) juga menambahkan bahwa keuntungan lain dari partisipasi adalah meningkatkan kemampuan (*empowerment*) dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Definisi pertama yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Sedangkan definisi kedua, dan berlaku universal adalah bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dalam penelitian ini, definisi partisipasi masyarakat lebih dekat pada apa yang diungkapkan oleh Soetrisno di atas yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana (pemerintah) dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan dapat diukur dari besarnya peran dan wewenang masyarakat dalam menentukan, menyediakan mengaudit dan memelihara infrastruktur yang dibangun.

Perencanaan

Perencanaan pembangunan wilayah dan perkotaan memiliki sejarah yang cukup panjang dengan berbagai pendapat dan pandangan yang sangat beragam. Setelah perang dunia kedua kegiatan perencanaan perkotaan mengalami kemajuan yang sangat pesat akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan, yang menggunakan instrumen observasi dan pengalaman sebagai dasar analisis, permasalahan sosial yang pelik dipecahkan dengan cara menerapkan peraturan berjenjang dari pemerintah, terutama di level nasional. Perangkat di daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sebagai pelaksana pembangunan.

Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam sharing informasi, merumuskan tujuan, menseting kebijakan, mengalokasikan sumber - sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh, dengan kata lain, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil-hasilnya.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat merujuk pada wujud kontribusi masyarakat dalam keikutsertaannya. Wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat sudah barang tentu tergantung pada tahapan proses pelaksanaan program, karena wujud kontribusi tersebut akan berbeda pada setiap tahapan. Misalkan dalam tahapan partisipasi pada pengambilan keputusan, maka wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat berupa sumbangan pemikiran dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya usul dan saran atau bahkan penolakan. Hal yang sama dikatakan oleh Cohen dan Uphoff (1979) bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam - macam seperti: kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Melihat dari tahapan pelaksanaan pembangunan, dimana partisipasi terbagi atas partisipasi langsung dan tidak langsung. partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, misalnya dalam proyek pembangunan jalan, anggota masyarakat ikut serta dalam pekerjaan membangun jalan tersebut. Sedang partisipasi secara tidak langsung berupa bantuan dana dan material yang diperlukan.

Dari uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi yang merupakan wujud kontribusi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan desa sangat variatif. Untuk alasan penyederhanaan sebagai indikator besaran partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikannya berdasarkan wujud konkrit yaitu kontribusi berbentuk natura dan berbentuk innatura. Bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang berwujud natura lebih mudah terukur secara kuantitas karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Seta sebaliknya, bentuk partisipasi masyarakat yang berwujud innatura perlu pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengukurnya secara kualitas.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi yang dilihat dari besaran kerelaan atau keiklasan dari partisipasi (masyarakat) dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi asli dan semu. Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan keterlibatan masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, kebersamaan dalam ketetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan implementasi. Bila keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, penetapan keputusan oleh pihak luar atau ditentukan oleh pemerintah, maka partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu. Selain itu ciri partisipasi asli adalah tumbuh dari bawah (*grassroots*), berfokus pada pendistribusian kue pembangunan secara merata, berfungsi untuk mempertinggi kesadaran terhadap kemampuan sendiri dan percaya bahwa partisipan dapat mempengaruhi hasil, Hetifa Sj Sumarto (2003).

Pembangunan infrastruktur merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dalam penyediaannya. Untuk itu membagi tingkatan partisipasi berdasarkan kerelaan. Berdasarkan peran dan wewenang yang ada masyarakat sebagai partisipan. Wewenang kaitannya dengan tanggung jawab yang ada pada pemerintah. Dalam konteks ini, jika masyarakat ikut berperan dalam memberi informasi namun pemerintah tidak memberikan wewenangnya pada masyarakat untuk berkolaborasi maka partisipasi ini pada tingkatan partisipasi pasif. Sedangkan perang kaitannya dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat mulai dari ikut bekerja dengan bayaran,

ikut bekerja tanpa bayaran, memilih opsi yang diberikan, ikut merencanakan hingga merencanakan dan melaksanakan secara mandiri.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi keikutsertaannya terlibat dalam program yang ditawarkan pemerintah yaitu pada masyarakat, Ali Nurdin (2000) partisipasi bergantung pada kondisi ekonomi, sosial budaya dan keberadaan lingkungan dari masyarakat yang terlibat serta tingkat pendidikan masyarakat. Bahwa sosial yang dapat digunakan para perencana untuk dapat mengetahui bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan adalah faktor geografis, organisasi dan budaya lokal, ekonomi masyarakat serta sosial politik yang berkembang. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dikelompokkan dalam 4 (empat) aspek yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Pada tingkat lokal, karakteristik wilayah perdesaan yang ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan mayoritas pekerjaan penduduknya. Seperti pengklasifikasian desa yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian pemberdayaan daerah tertinggal yang membaginya menjadi dua, yaitu desa tertinggal dan desa tidak tertinggal. Karakteristik suatu desa yang dapat digolongkan menjadi desa tertinggal salah satu kriterianya berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengklasifikasian desa menurut Departemen Dalam Negeri yaitu berdasarkan tipologi desa atau karakteristik mayoritas pekerjaan penduduknya, seperti desa nelayan, desa perkebunan, desa perladangan, desa persawahan, desa industri dan lain sebagainya. Karakteristik desa ditinjau dari aspek ekonomi kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan penduduk dan mayoritas pekerjaan penduduknya.

b. Aspek Sosial Budaya

Perbedaan karakteristik suatu wilayah secara mudah dapat diidentifikasi dari sosial budaya yang berkembang pada masyarakat setempat. Bahkan pembagian teritorial suatu wilayah banyak disebabkan oleh sosial budaya yang berkembang pada masyarakat yang mendiaminya, karena aspek sosial budaya merupakan arena yang sangat luas untuk difahami kaitannya dengan hubungan antara partisipasi masyarakat dengan karakteristik sosial budaya masyarakat lokal yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini, variabel sosial budaya yang dibahas lebih menekankan pada variabel-variabel yang pernah diteliti sebelumnya kaitannya dengan keberadaan partisipasi masyarakat. Paham dari ilmu sosial kemasyarakatan mengungkapkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup dengan memerlukan bantuan dari orang lain. Kesadaran yang timbul akibat saling membutuhkan dan persamaan kepentingan pada akhirnya akan membentuk kelompok yang sering disebut sebagai masyarakat, sedangkan masyarakat lokal diartikan sebagai sekelompok individu yang bertempat tinggal di suatu teritorial wilayah dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi sosial yang lebih besar diantara para anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas teritorialnya. Pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara garis besar fakta sosial terdiri dari dua tipe, yaitu struktur sosial

dan pranata sosial. Kedua tipe ini mempunyai dua sifat, yaitu (1) nilai- nilai umum, dan (2) norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur.

c. Aspek Geografi Wilayah

Aspek geografis suatu desa yang dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat pada penelitian ini meliputi jarak desa dengan pusat kota, aksesibilitas ekstra dan intra serta sumberdaya alam yang dimilikinya. Pada kasus dimana letak geografis wilayah suatu desa jauh dari kota maka keadaan yang biasa dijumpai minimnya perhatian dalam pembangunan. Keberadaan geografis desa yang didalamnya menyangkut sumberdaya alam yang dimiliki, telah menjadikan suatu wilayah memiliki potensi yang lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya secara ekonomi. Dalam suatu keadaan ideal dimana keberadaan sumberdaya alam khususnya barang tambang golongan C dalam satu desa dimanfaatkan dengan baik maka keberadaan prasarana transportasi pada desa tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan desa lainnya yang tidak memilikinya. Dikaitkan dengan konteks partisipasi maka anggapan yang muncul adalah keberadaan penambangan pasir dan batu (galian C) yang merupakan bahan dasar pembuatan jalan akan berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat khususnya dalam berkontribusi untuk menyumbang bahan konstruksi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 9 Desa di Kabupaten Lanny Jaya. Pemilihan wilayah pengamatan ditentukan model purposive dan pemilihan didasari oleh asas generalisasi dimana desa-desa yang terpilih merupakan perwakilan dari desa-desa yang tidak terpilih namun diasumsikan memiliki karakteristik yang sama. Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan.

Dalam memperjelas permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan survei langsung melalui wawancara dengan 6 orang responden disetiap desa yang menjadi sampel sesuai dengan kebutuhan analisis terkait dengan objek penelitian data. Data sekunder yaitu data yang bersumber atau diperoleh dari kantor-kantor atau instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dan judul penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dengan mendatangi langsung ke sumber data yakni instansi terkait untuk mendapatkan data diperlukan. Metode wawancara dan pengamatan (observasi) serta menggunakan daftar pertanyaan. Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif kuantitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Lanny Jaya yang beribukota di Tiom, terletak antara $138^{\circ} 30'$ - $139^{\circ} 40'$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 45'$ - $4^{\circ} 20'$ Lintang selatan. Memiliki luas wilayah 8.496 Km². Sebelah Utara Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Maberamo Tenga, di sebelah Selatan Kabupaten ini adalah Kabupaten Nduga, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jaya Wijaya, sebelah Barat adalah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Papua. Kabupaten ini memiliki 24 Distrik yang terbagi menjadi 245 desa. Kabupaten Lanny Jaya secara administrasi terdiri dari 24 distrik/kecamatan yang meliputi; Distrik Tiom, Tiom Nerri, Melagai, Balingga, Kujawagi, Prime, Makky, Gamelia, Dibah, Poga, Milimbo, Indawa, Goloh, Kalowa, Beam, Konenga, Bukgonak, Air Garam, Tinggi Purah, Guna, Mokoni, Gupura, Gibuk, dan Jugunogobak. Jumlah desa, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2013, diketahui bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Tiom yaitu 62.000 jiwa dan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Konenga dengan jumlah penduduk 2.450 jiwa.

Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah 8.496 km² didiami oleh 384.628 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 23,49 jiwa/km². Ini berarti bahwa setiap 1 km² di huni sekitar 23 jiwa penduduk. Di antara sejumlah Kecamatan yang ada kepadatan tertinggi yaitu di kecamatan Tiom yakni sebanyak 61,69 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah adalah kecamatan Gibuk yakni sebesar 3,74 jiwa/km². Dari hasil sensus tahun 2013 di Kabupaten Lanny Jaya, diperoleh jumlah penduduk sebanyak 187.889 jiwa sementara pada sensus penduduk tahun 2003 diperoleh hasil sebesar 89.167 jiwa, maka laju pertumbuhan di Kabupaten Lanny Jaya sebesar 8,39 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk ini tergolong tinggi mengingat wilayah pengunungan tengah terus mengalami perkembangan dengan semakin banyaknya pendatang yang tinggal di Kabupaten Lanny Jaya. Jika laju pertumbuhan penduduk dilihat per kecamatan, maka laju pertumbuhan tertinggi berada di kecamatan Prime yaitu sebesar 12,73 persen per tahun, sedangkan yang terendah yaitu kecamatan Dibah yaitu sebesar 0,66 persen per tahun. Namun demikian mayoritas pendatang bertempat tinggal di ibukota kecamatan, yaitu Tiom.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi APM menunjukkan semakin banyak anak yang menikmati pendidikan. Tinggi rendahnya partisipasi sekolah secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ketersediaan tenaga pengajar, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak, keinginan anak untuk belajar, dan faktor budaya setempat. Sedangkan pengaruh tidak langsung antara lain faktor ekonomi, tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua, kegiatan anak mencari uang sebelum waktunya serta pengaruh lingkungan fisik. Secara umum, APM pada tahun 2012/2013 mencapai 63,74 persen. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012/2013, terdapat 36,26 persen murid SD yang umumnya di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun. Pencapaian Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-laki yang berada di bawah 100 persen, menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam suatu jenjang pendidikan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Pembahasan

a. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan dengan cara memperbaiki akses mobilisasi warga, melalui pembeconan jalan di Kabupaten Lanny Jaya Papua. Beberapa desa / kelurahan Hingga Februari 2014 proses pembangunan dan pembeconan jalan perdesaan sudah berlangsung dengan total panjang jalan mencapai lebih dari 1.200 meter. Seluruh proses pembangunan jalan ini dilakukan dengan basis partisipasi masyarakat, yakni masyarakat yang berperan langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati manfaat berbagai pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah Masyarakat mengidentifikasi kebutuhan, mengurus perizinan yang diperlukan dan secara bersama-sama merawat keberlangsungan manfaat infrastruktur ini.

Pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk melestarikan semangat gotong-royong, juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi kontraktor atau *supplier* lokal. Dukungan yang ketat disediakan oleh staf ahli konstruksi infrastruktur yang dibangun tersebut. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) merupakan program primadona. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 ini, program pemberdayaan tersebut diusulkan akan ditambah menjadi 3000 desa sasaran. Sehingga, target 4400 Desa tahun ini meningkat menjadi 7400 desa sasaran. Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Tingkat Pusat Program PIIP 2012 di Jakarta, Selasa (20/3). Pengalihan subsidi BBM yang rencananya dilakukan awal April nanti salah satunya adalah untuk program PIIP. Program pemberdayaan ini terbukti berhasil.

b. Karakteristik Responden

1. Jumlah Responden Menurut Umur

Tabel 1. Jumlah Responden Menurut Umur

No.	Umur (tahun)	Jumlah orang	%
1.	25-29	-	-
2.	30-34	10	18,51
3.	35-39	15	27,77
4.	40-45	12	22,22
5.	46-50	9	16,66
6.	51-55	8	14,81
Jumlah		54	100

2. Pekerjaan

Tabel 2. Jumlah Responden Menurut Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah orang	%
1.	Petani	42	77,78
2.	PNS	11	20,37
3.	Swasta	1	1,85
	jumlah	54	100

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Jumlah Responden Menurut Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah orang	%
1.	SD	26	48,14
2.	SMP	17	29,62
3.	SMA	7	12,96
4.	PT	4	7,40
	jumlah	54	100

c. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pembangunan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat melalui tahapan –tahapan sebagaimana yang termuat dalam program yaitu di mulai dari pengalihan gagasan pada tingkat musyawarah desa (musdes) kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut, kemudian diikutsertakan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan. Bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam tahap perencanaan adalah kehadiran dalam rapat serta keaktifan dalam member saran atau usulan.

1. Bentuk partisipasi dari masyarakat

Tabel 4. Bentuk Partisipasi dari Masyarakat

No.	Bentuk partisipasi	Jumlah orang	%
1.	Memberikan usulan/saran	45	83,33
2.	Memberikan kritik	0	0
3.	Tidak memberikan partisipasi	9	16,67
	jumlah	54	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan terlihat sekali sebagian besar partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau usulan yaitu sebesar 83,33% atau 45 orang dan sisanya tidak memberikan partisipasi adalah 9 orang 16,67%. Tidak terdapat masyarakat yang memberikan kritik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan semua masyarakat mendukung program ini.

2. Jumlah Partisipasi masyarakat.

Tabel 5. Jumlah Partisipasi Masyarakat Tingkat Keaktifan Peserta Rapat Desa

No.	Partisipasi Masyarakat	Jumlah orang	%
1.	Aktif	27	50
2.	Kurang aktif	18	33,3
3.	Tidak aktif	9	16,6
	jumlah	54	100

Tabel diatas menunjukkan partisipasi peserta yang aktif dalam rapat desa yaitu 27 orang 50% di ikuti oleh kurang aktif adalah 18 orang 33,3% dan tidak memberikan partisipasi adalah hanya 9 orang 16,6%. Hal ini terlihat rapat desa mengikuti proses pengambilan keputusan kegiatan partisipasi masyarakat melali rapat desa.

d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

1. Bentuk partisipasi dari masyarakat

Tabel 6. Bentuk-Bentuk Partisipasi dari Masyarakat

No.	Bentuk partisipasi masyarakat	%
1.	Dana	2
2.	Tenaga	77
3.	Material	18
4.	Tanah dan tanam tumbuh	3
	jumlah	100

Bentuk. partisipasi yang terbesar pada pelaksanaan pembangunan adalah sumbangan tenaga yang mencapai 77%, kemudian diikuti oleh sumbangan material matrial 18%, sumbangan dana sekitar 2%, serta yang terkecil berbentuk sumbangan tanah dan tanam tumbuh yaitu 3%.

2. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

Tabel 7. Partisipasi Masyarakat Tingkat Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Pada Tingkat Pelaksanaan

No.	Partisipasi masyarakat	Jumlah orang	Persentase (%)
1.	Aktif	27	50
2.	Kurang aktif	18	33,33
3.	Tidak aktif	9	16,67
	jumlah	54	100

Hasil wawancara terlihat partisipasi masyarakat yang terbesar pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa adalah keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi yang mencapai 50% atau 27 orang kemudian diikuti oleh kurang aktif 18 orang atau 33,33% dan tidak aktif adalah 9 orang atau 16,67%.

e. Tingkat Pemeliharaan

1. Bentuk partisipasi masyarakat

Tabel 8. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pemeliharaan

No.	Bentuk partisipasi	Jumlah orang	%
1.	Tenaga	25	46,29
2.	Uang	15	27,77
3.	Tidak memberikan	14	25,92
4.	Jumlah	54	100

2. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

Tabel 9. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Pada Tahap Pemeliharaan

No.	Partisipasi masyarakat	Jumlah orang	%
1.	Aktif	15	27,77
2.	Kurang aktif	19	35,18
3.	Tidak aktif	20	37,03
	Jumlah	54	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DPD/K di Kabupaten Lanny Jaya secara kuantitatif/deskriptif, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

a. Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam kontribusinya menyumbang dana, tenaga, material bahkan tanah pekarangan. Untuk dapat menerima peran dalam berpartisipasi harus ada kemampuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan desa apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Merujuk pada hasil diatas, dapat dibuktikan bahwa tingkat perekonomian masyarakat suatu desa yang ditunjukkan dari banyaknya keluarga sejahtera di desa tersebut, akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Kenyataan ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat menyatakan pada keluarga sejahtera kemampuan untuk turut berkontribusi dalam hal menyumbang dalam bentuk dana lebih besar dibandingkan dengan keluarga miskin. Terlebih lagi pada masyarakat miskin kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa sangat sangat kurang, hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian mereka yang menuntut untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang ikut berpartisipasi. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat desa, akan menentukan tingkat partisipasi dalam pembangunan.

b. Sosial budaya

Karakteristik desa yang ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat desa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap besarnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan infrastruktur jalan desa. Indikasi ini terlihat dari rumah tanga petani dan jumlah organisasi dalam satu desa positif terhadap partisipasinya. Tingginya partisipasi masyarakat di desa-desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani disebabkan oleh dua hal yaitu waktu dan budaya. Petani cenderung lebih memiliki waktu luang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bermata pencaharian lainnya. Terlebih lagi, petani khususnya petani penggarap, memiliki sikap gotong-royong yang tinggi. Hal ini dapat terlihat pada saat membuka lahan, tanam dan panen, dimana mereka selalu bekerja secara berkelompok. Biasanya para petani juga memecahkan masalah yang mereka hadapi secara bersama. Kenyataan ini melengkapi pernyataan yang diungkapkan masyarakat petani yang memiliki budaya dan sistem interaksi sosial yang berbeda dari masyarakat lainnya.

c. Geografis

Dalam penelitian ditemukan bahwa karakteristik desa yang ditinjau dari aspek geografis, sama sekali tidak berpengaruh terhadap besarnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Kenyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat suatu desa tidak dipengaruhi baik oleh jumlah unit penambangan galian yang dimiliki ataupun jarak ke Kota Kecamatan. Selain itu kurang lancarnya hubungan antara jarak ke Kota Kecamatan dengan partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh teknologi informasi saat ini yang semakin berkembang. Kemajuan teknologi telah menjadikan keterbatasan jarak secara fisik dapat dieliminir dan berimbas pada perubahan sosial yang semakin cepat pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sehingga jarak fisik tidak lagi merupakan hambatan masyarakat dalam berinteraksi sosial.

4. PENUTUP

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemeliharaan. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa pada tahap perencanaan, terdiri dari partisipasi dalam bentuk memberikan saran/usulan, kritik dan tidak memberikan partisipasi. Sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam bentuk memberikan saran/usulan. Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terdiri atas sumbangan tenaga, dana, dan material. Bentuk partisipasi masyarakat yang terbesar adalah bentuk sumbangan tenaga yang mencapai 77%, kemudian diikuti oleh sumbangan material 18%, tanah dan tanam tumbuh 3%, serta yang terkecil berbentuk sumbangan dana yaitu sebesar 2%. Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan terdiri atas tenaga, uang dan tidak memberikan partisipasi. Bentuk partisipasi terbesar yaitu tenaga dengan persentasi 46,29%.

Disarankan kepada masyarakat Kabupaten Lanny Jaya agar mempertahankan terus keikutsertaan partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa dan diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Nurdin. 2000. *Identifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam Pemeliharaan Prasarana Paca Program P3DT*, Tasikmalaya.
- BPS Provinsi Papua. 2005. *Data Jumlah Penduduk*. Jayapura Papua.
- Hetifa Sj Sumarto. 2003. *Inovasi , Partisipasi dan Good Governace*. Jakarta.
- Lin Herlina. 2003. *Partisipasi sebagai salah satu Determinan dalam Pembangunan Desa*. Tesis ITB
- Panouw Diane. 2003. *Analisis Pembangunan Desa Wilayah*. Tesis pasca sarjana unstrat manado.
- Siagian H. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung.
- Cohen And Uphoff 1979 *Feasibility And Application Of Rural Develomen Participate*, Cornell University, Ithaca.